

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desentralisasi menjadi topik yang populer di Indonesia sejak pemerintah Indonesia yang memperkenalkan kebijakan otonomi daerah. Keseriusan pemerintah Indonesia menghasilkannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004. Kebijakan otonomi daerah telah menempatkan Kab/Kota sebagai titik berat otonomi, telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintah di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintah di daerah. Hal tersebut membawa angin baru bagi perkembangan daerah di Indonesia. (UU No.32 Tahun 2004).

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat mengharapakan Pemerintah Daerah dapat memenuhi setiap kebutuhan di daerahnya masing-masing. Hal ini akan membuat setiap daerah lebih mandiri dalam pengelolaan di berbagai bidang. (UU No.32 Tahun 2004).

Pembangunan daerah bagian dari pembangunan Nasional yang dilaksanakan untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pembangunan daerah ada salah satu tugas pokok pemerintah daerah. Peningkatan Pedapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengetahui secara nyata tentang kemampuan daerah

dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Diharapkan ini menjadi salah satu komponen andalan penerimaan daerah di era otonomi daerah. (Siagian, 2005:4-5)

Indikator yang paling penting untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran (APBD) mencerminkan tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. (UU Nomor 32 Tahun 2004).

Menurut Prof. Meier diterjemahkan oleh Rahardjo Adisasmita (2005:205) mendefinisikan proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu jangka waktu yang panjang merupakan pembangunan ekonomi. Menurut E. Guyer Freuler diterjemahkan kembali oleh Koko Irawan, (2010:10)

- Travel : Perjalanan, dalam bahasa Indonesia disebut dengan “*wisata*”.
- Tour : Dalam bahasa Indonesia disebut dengan “*Pariwisata*”. Perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain.
- Travellers : Dalam bahasa Indonesia disebut dengan “*Wisatawan*”. Orang yang melakukan perjalanan.
- Tourisme : Dalam bahasa Indonesia disebut dengan “*Kepariwisataan*”. Hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Undang-undang ini mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan pasal 108 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang obyek retribusi terdiri dari jasa umum, jasa usaha dan perizian tertentu.

Selain tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Undang-undang No.28 Tahun 2009, menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan sistem dan pengelolaan umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya system dan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009. Prinsip Komersial dipakai dalam pemungutan iuran retribusi .

Bila melihat pada besarnya kunjungan wisatawan ke Indonesia pada tahun 2016, Kementerian Pariwisata menetapkan target kunjungan wisatawan ke Indonesia sebesar 272 juta wisatawan. Wisatawan tersebut meliputi 12 juta berasal dari mancanegara dan 260 juta merupakan wisatawan nusantara. Lebih lanjut dalam situs kemenpar.go.id, menyampaikan pemerintah ke depannya menetapkan target kunjungan sebanyak 20 juta wisatawan asing dengan target pemasukan devisa sebesar 260 Triliun. Target tersebut optimis dapat dicapai mengingat pada 2014, sektor pariwisata menyumbang devisa sebesar US \$10,69 miliar atau setara dengan RP 136 miliar.

Tabel 1.1 Data Kunjungan Wisatawan Kota Padang

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Domestik	Jumlah
2013	53.057	3.001.306	3.054.363
2014	54.967	3.199.392	3.254.359
2015	57.318	3.298.454	3.355.772
2016	58.903	3.632.820	3.691.723
2017	67.286	4.368.375	4.435.661

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang 2018

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwasanya setiap tahunnya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik kota Padang mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 merupakan kunjungan terbesar wisatawan kota Padang dengan jumlah 4.435.661 orang dalam rincian wisatawan mancanegara sebesar 67.286 orang dan wisatawan domestik sebesar 4.368.375 orang. Dan pada tahun 2013 merupakan kunjungan wisatawan kota Padang terkecil dengan jumlah 3.054.363 orang dalam rincian wisatawan mancanegara sebesar 53.057 orang dan wisatawan domestik sebesar 3.001.306 orang

Pada beberapa tahun terakhir ini Pemerintah Kota Padang sangat gencar dalam memperbaiki sarana dan pra sarana dalam bidang pariwisata karena sektor pariwisata ini cukup banyak menyumbang untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan juga Pariwisata Kota Padang banyak mengundang para wisatawan untuk berkunjung. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mencari tahu perkembangan yang terjadi di bidang pariwisata Kota Padang.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil topik : “ KONTRIBUSI RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG”

B. RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan secara cermat dan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Selain itu, bertujuan agar penelitian dapat terarah dan terbatas pada objek-objek permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian pada kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang ini, penulis ingin mengetahui beberapa hal mengenai :

1. Berapa besar kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.
2. Destinasi pariwisata mana yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.
3. Apakah pendapatan dari sektor pariwisata sudah efektif

C. TUJUAN MAGANG

1. Untuk menganalisis berapa besar kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang
2. Mengetahui destinasi pariwisata mana yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.
3. Mengetahui pendapatan dari sektor pariwisata sudah efektif atau belum.

D. MANFAAT MAGANG

Magang adalah sebuah peluang menguntungkan yang diberikan kepada mahasiswa untuk memiliki pengalaman bekerja. Magang biasanya dilakukan di instansi pemerintah terkait dengan waktu sekitar 3 bulan. Kegiatan merupakan suatu proses untuk mempelajari praktek-praktek pekerjaan yang nyata, sehingga dapat memberikan manfaat bagi siswa magang sendiri. Adapun manfaat magang yang dicapai yaitu :

1. Manfaat bagi penulis
 - a) Untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja yang sesungguhnya
 - b) Menambah ilmu dan wawasan mengenai Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata

- c) Membentuk kepribadian yang bertanggung jawab, mandiri, terlatih, disiplin, dan tangguh yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja.
- d) Terlatih menyesuaikan diri dalam ruang lingkup yang luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter dalam kepribadian serta kedisiplinan ilmu yang berbeda.
- e) Untuk meningkatkan kemampuan berpikir berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Keuangan Negara dan Daerah.

2. Manfaat bagi tempat magang

- a) Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan instansi pemerintah sehingga dikenal oleh kalangan akademis.
- b) Adanya kritikan-kritikan yang membangun dari mahasiswa-mahasiswi yang melakukan praktek magang
- c) Instansi pemerintah mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswi yang melakukan praktek magang

3. Manfaat bagi Universitas

- a) Terjalannya kerjasama “bilateral” antara Universitas Andalas dengan Instansi Pemerintahan.
- b) Universitas Andalas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui kegiatan magang.
- c) Universitas Andalas akan dikenal di dunia Instansi Pemerintahan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana di setiap bab terdiri dari sub-bab yang menjadi suatu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan secara teori mengenai definisi Pendapatan Asli Daerah dan berapa kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah serta destinasi pariwisata yang ada di Kota Padang.

Bab III Gambaran Umum

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, sejarah umum serta gambaran operasi dan struktur organisasinya.

Bab IV Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penulisan, memuat kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

Bab V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat untuk dapat dipertimbangkan dalam rangka peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.